

Analisis Kesenjangan Ekonomi Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Abdul Gafur^{1*}, Salva Hunaya Rahmi², Fadlun Ahmadi³^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Email: abdulgafur@gmail.com

ABSTRACT

The economic gap between urban and rural areas in Indonesia is a persistent problem, despite various development programs. This study aims to analyze the factors causing this gap by 2025, covering aspects of income, infrastructure access, education, and economic opportunities. Data used are sourced from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance, and World Bank reports. The results show that income inequality remains quite high, with a lower Gini index in rural areas than in urban areas. However, disparities in access to public services, digital infrastructure, and non-agricultural employment opportunities remain significant. Integrated policies based on region and people are needed to narrow this gap.

Article History

Received 2025-09-26

Revised 2025-11-21

Accepted 2025-11-25

KeywordsKesenjangan
Ekonomi,
Daerah Perkotaan,
Daerah Pedesaan,
Indeks Gini

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu isu strategis yang terus menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Wilayah perkotaan umumnya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsentrasi infrastruktur yang memadai, peluang kerja yang beragam, dan akses layanan publik yang relatif lebih baik. Sementara itu, wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan yang memadai, fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, serta konektivitas digital yang memadai (Bappenas, 2024). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), meskipun angka kemiskinan nasional mengalami tren penurunan dalam satu dekade terakhir, kesenjangan pendapatan antarwilayah tetap tinggi. Hal ini tercermin dari disparitas PDRB per kapita antara kabupaten/kota yang berkarakter perkotaan dengan daerah pedesaan yang masih dominan sektor primer. Ketimpangan ini berpotensi menghambat pemerataan kesejahteraan dan memunculkan masalah sosial yang kompleks.

Fenomena kesenjangan ini juga memicu masalah turunan seperti urbanisasi berlebihan, di mana penduduk desa bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Namun, urbanisasi yang tidak terkelola berpotensi menciptakan beban baru di perkotaan, seperti kemacetan, tekanan terhadap perumahan, serta meningkatnya jumlah pengangguran terselubung di sektor informal (World Bank, 2023).

Selain faktor ekonomi, dimensi sosial juga memainkan peran penting dalam memperlebar jurang kesenjangan. Akses pendidikan di perkotaan cenderung lebih berkualitas karena dukungan tenaga pendidik yang lebih terlatih dan fasilitas yang lengkap. Sebaliknya, di pedesaan, keterbatasan tenaga pengajar, sarana-prasarana sekolah, dan akses ke materi pembelajaran berbasis teknologi masih menjadi kendala (Kemdikbudristek, 2024).

Konektivitas digital menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesenjangan modern. Wilayah perkotaan telah lebih dulu menikmati jaringan internet berkecepatan tinggi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Sementara itu, pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam hal cakupan jaringan, kecepatan akses, dan keterjangkauan biaya layanan, yang berdampak pada peluang usaha, akses informasi, dan inovasi lokal (OECD, 2023). Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan juga memperparah kesenjangan

kesejahteraan. Fasilitas kesehatan di perkotaan cenderung lebih lengkap, baik dari sisi peralatan medis maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Di sisi lain, masyarakat pedesaan sering kali harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan memadai, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup dan produktivitas (Kemenkes, 2024).

Permasalahan kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas politik dan pembangunan jangka panjang. Ketidakmerataan pembangunan dapat memunculkan rasa ketidakadilan antarwilayah yang berpotensi menghambat kohesi sosial dan memperlemah integrasi nasional (Suryahadi et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, implikasinya terhadap pembangunan nasional, serta strategi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan akan menggabungkan analisis ekonomi, sosial, dan infrastruktur dengan fokus pada intervensi kebijakan berbasis wilayah (place-based) dan berbasis manusia (people-centered) untuk mencapai pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah adalah merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi agar tumbuh secara baik serta menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan baik terhadap kawasan tersebut maupun antar kawasan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bratakusumah, (dalam Hairudin, 2008), bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, ini mengartikan bahwa suatu pembangunan wilayah dapat menyebabkan pertumbuhan baik fisik maupun non fisik. Dengan kata lain pertumbuhan dapat berupa pengembangan/persebaran atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun oleh komunitas masyarakat.

Sementara pengertian kota menurut Sinulingga (1999) adalah tempat bermukim penduduk serta sekaligus menjadi tempat penyediaan pelayanan umum terhadap kota. Dengan melihat definisi tersebut bahwa kota lebih menekankan pada aspek sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan suatu kota. Adapun Tujuan utama dari pembangunan wilayah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan dalam jangka panjang, diantaranya:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan wilayah merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah. Tujuan utama dari pembangunan wilayah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.
2. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan wilayah juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui investasi dalam infrastruktur, industri, dan sektor-sektor ekonomi lainnya, wilayah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan merangsang kegiatan ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan dan peluang usaha.
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Aspek lingkungan juga menjadi salah satu fokus utama pembangunan wilayah. Tujuan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan alam serta mencegah dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem. Dengan melibatkan praktik-praktik ramah lingkungan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan, wilayah dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.

4. Memperbaiki Akses dan Konektivitas Tujuan pembangunan wilayah juga termasuk meningkatkan akses dan konektivitas antara wilayah-wilayah dalam skala lokal, regional, dan internasional. Infrastruktur transportasi dan teknologi informasi yang baik dapat membuka peluang baru dalam perdagangan, investasi, dan pertukaran pengetahuan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Perbedaan Ekonomi Kota Dan Desa

Kegiatan ekonomi di kota lebih beragam dan kontemporer. Banyak orang bekerja di kantor, pabrik, toko, atau bisnis besar, dan kota memiliki banyak mall, pasar, dan industri yang membuat perputaran uang lebih cepat. Selain itu, karena internet dan teknologi berkembang pesat, banyak orang sekarang juga dapat bekerja secara online atau mendirikan bisnis digital. Hidup di kota, bagaimanapun, juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Makanan, transportasi, dan tempat tinggal lebih mahal dibandingkan di desa, dan meskipun penghasilan orang kota biasanya lebih tinggi, mereka juga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dan Ekonomi desa sebagian besar bergantung pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Banyak orang bekerja sebagai petani menanam padi, sayur, atau buah-buahan, ada juga yang beternak ayam, sapi, atau kambing; dan ada juga usaha kecil seperti membuat kerajinan tangan atau makanan tradisional. Hidup di desa lebih murah, meskipun fasilitasnya tidak lengkap di kota. Masyarakat desa biasanya bergotong royong dan hidup lebih sederhana dibandingkan masyarakat kota. Namun, banyak anak muda desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik karena kurangnya lapangan kerja.

Kehidupan ekonomi masyarakat desa dan kota tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apalagi wilayah pedesaan yang letaknya cukup terpencil dengan beberapa pemukiman kecil dan jauh dari hiruk pikuk keramaian. Sementara perkotaan cenderung 24 jam aktivitas berjalan terus tidak berhenti sehingga hal ini jelas mempengaruhi kehidupan ekonomi kota dan desa. Selain itu, kamu dapat melihat perbedaan kehidupan ekonomi masyarakat desa dengan kota melalui beberapa hal berikut ini:

1. Dominasi Masyarakat Homogen Dan Heterogen

Masyarakat desa cenderung sebagai masyarakat homogen, dimana setiap mata pencarian masyarakat desa memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya seperti bertani dan beternak. Sementara itu, masyarakat kota cenderung ke arah masyarakat heterogen. Dimana, pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat kota cukup beragam. Mulai dari karyawan perkantoran, wirausahawan, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan kesempatan bekerja cenderung lebih unggul di kota daripada di desa.

2. Keinginan Untuk Berpindah Tempat

Masyarakat di desa cenderung memiliki keinginan untuk merantau ke kota atau tempat yang bisa memberikan mereka kehidupan lebih baik. Hal ini tentu kehidupan ekonomi yang baik seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Orang-orang desa yang sudah berhasil dan sukses di kota biasanya enggan untuk balik lagi ke desanya karena sudah menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dibanding desa. Sedangkan masyarakat perkotaan biasanya menjadikan desa sebagai alternatif untuk menenangkan diri. Setelah suntuk dengan hiruk pikuk ibu kota, maka mereka menjadikan desa sebagai destinasi untuk menikmati hidup dengan tenang sementara. Selain itu, beberapa usia yang tidak produktif atau sudah pensiun biasanya ingin menghabiskan masa tuanya di pedesaan.

3. Kesadaran Akan Kualitas Pendidikan Yang Rendah

Kehidupan ekonomi suatu masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang didapat. Semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang, maka pengetahuan yang dimiliki juga akan semakin tinggi. Hal ini akan mempengaruhi kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi seseorang. Kualitas pendidikan pada masyarakat desa cenderung lebih rendah jika dibandingkan masyarakat kota. Hal ini lebih kepada kemudahan dalam mendapatkan sarana dan prasarana. Masyarakat kota biasanya lebih diunggulkan untuk mendapatkan informasi

sehingga mereka akan lebih dulu menerapkannya dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, perbedaan kehidupan ekonomi juga dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang didapat oleh masyarakat kota dan masyarakat desa.

4. Kebiasaan Dalam Mengikuti Arus

Kehidupan ekonomi masyarakat desa dan kota juga dapat dibedakan dari kecenderungan untuk mengikuti arus. Misalnya saja pada masyarakat desa yang mengerjakan pekerjaan secara turun temurun diberikan dari generasi sebelumnya dan sudah ada sejak lama. Dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua akan diwariskan ke anak-anak mereka. Sementara untuk masyarakat kota, mereka bebas untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Hal ini karena banyaknya kesempatan kerja yang ada di kota. Sehingga kesempatan untuk melawan arus atau tidak mengikuti pekerjaan orangtua yang dirasa bukan menjadi minat mereka dapat dialihkan ke jenis pekerjaan lain.

5. Fokus Pada Satu Bidang Pekerjaan

Bagi masyarakat desa, pekerjaan utama mereka adalah bertani. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Sementara untuk mencari pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan sambil menunggu hasil panen biasanya dilakukan di luar bidang pertanian. Akan tetapi, sifat dari pekerjaan tersebut hanya dianggap sebagai sampingan karena pekerjaan utama adalah bertani. Mereka akan kembali ke pekerjaan utama saat musim tanam sudah kembali dan melakukan pekerjaan tersebut. Lain halnya dengan masyarakat kota yang bisa memilih berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan keahlian.

Ketika masyarakat kota memilih pekerjaan utama, maka mereka akan terus bekerja di posisi tersebut dan dapat memutuskan untuk pindah ke tempat lain karena keinginan dan pertimbangan yang menguntungkan pastinya. Biasanya karena tawaran gaji dan jenjang karir yang lebih menjanjikan dibandingkan tempat sebelumnya. Kehidupan ekonomi antara masyarakat desa dan kota memang dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, perbedaan lain pada masyarakat kota adalah dalam mengatur perencanaan keuangan untuk kebutuhan di masa mendatang. Salah satu yang biasa dilakukan adalah berinvestasi. Jika masyarakat di desa rata-rata berinvestasi dengan menabung, maka masyarakat di kota biasanya lebih suka untuk menggunakan instrumen investasi seperti reksa dana atau saham.

Kesenjangan Ekonomi

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu : (1) kesenjangan antar daerah, (2) kesenjangan antar sektor, dan (3) kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat (Basri, 1995 : 92). Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan, yaitu : Kurva Lorenz, Indeks Gini, dan kriteria Bank Dunia, Indeks Williamson.

Isu kesenjangan dan pertumbuhan hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Menurut Kuncoro (2003:135) seringkali ada trade off antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Menurut World Bank (1990:55), antara pertumbuhan dan kemiskinan bukanlah suatu trade-off yang tidak dapat diatasi. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan, dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Penelitian dengan data silang tempat oleh Kuznetz (1955), diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan. Penelitian empiris Kuznetz mensinthesiskan adanya kurva U terbalik (inverted U curve), yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi

pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah

Sjafrizal (2008) menyatakan kesenjangan ekonomi antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antarwilayah sering menjadi permasalahan serius karena beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini telah memicu migrasi penduduk dari wilayah terbelakang ke wilayah maju sehingga timbul permasalahan sosial ekonomi di wilayah maju. Selain itu, kemajuan perekonomian yang tidak merata di setiap wilayah dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antarwilayah. Apabila dibiarkan semakin parah, dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara.

Secara teori, permasalahan kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat dijelaskan menggunakan Hipotesis Neoklasik. Penganut Hipotesis Neoklasik menyatakan pada permulaan proses pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai kesenjangan tersebut mencapai titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut, maka secara berangsurangsur kesenjangan ekonomi antarwilayah akan menurun. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai, peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedang daerah yang tertinggal tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan, maka kesenjangan ekonomi antarwilayah cenderung meningkat. Keadaan yang berbeda terjadi di negara maju dimana kondisi daerahnya umumnya dalam kondisi yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitas SDM. Dalam kondisi demikian, setiap peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antardaerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah (Anggraeni, 2012).

Bort dalam Sjafrizal (2008) menjadi pelopor yang mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi Neoklasik, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Bort menyatakan pada awal pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan mobilitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) kurang berjalan lancar. Dampaknya modal dan tenaga kerja akan terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga kesenjangan ekonomi antarwilayah melebar (divergen). Bila pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya fasilitas maka mobilitas faktor produksi semakin lancar sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah akan berkurang (convergen).

Menurut Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "trickle down effects" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas. Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara

miskin dan berkembang. Trade off atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi. Namun, pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis "U-Terbalik" Kuznet. Sesuai dengan rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan PDB perkapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk huruf U terbalik. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Indikator Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah

Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat diukur menggunakan perhitungan indeks ketimpangan regional Williamson. Istilah indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur kesenjangan ekonomi antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang. Secara statistik, indeks Williamson ini adalah coefficient of variation yang biasa digunakan untuk mengukur perbedaan. Indeks ini menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Hal yang dipersoalkan bukan antara kelompok kaya dan miskin, tetapi antara daerah maju dan terbelakang. Dari indeks Williamson dapat diketahui kesenjangan ekonomi antarwilayah yang terjadi semakin melebar atau berkurang. Jika semakin tinggi nilai indeks Williamson, berarti kesenjangan ekonomi antar wilayah semakin besar, dan sebaliknya (Anggraeni, 2012).

Teori dualisme ekonomi yang dikemukakan oleh Lewis (1954) membedakan secara tegas antara sektor tradisional, yang biasanya berlokasi di wilayah pedesaan, dan sektor modern, yang berkembang di wilayah perkotaan. Sektor tradisional dicirikan oleh teknologi rendah, produktivitas rendah, dan surplus tenaga kerja, sedangkan sektor modern memiliki teknologi lebih maju, produktivitas tinggi, dan tingkat upah yang lebih baik. Perbedaan mendasar ini menciptakan jurang kesejahteraan antara kedua wilayah.

Hipotesis Kuznets (1955) menambahkan perspektif yang berbeda, menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi karena pergeseran tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern. Seiring dengan berjalannya waktu dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta akses pendidikan, ketimpangan tersebut akan menurun. Namun, dalam konteks Indonesia, fase peningkatan ketimpangan ini berlangsung lebih lama karena disparitas pembangunan antardaerah yang signifikan (Bappenas, 2024). Dalam kajian ekonomi regional, teori konvergensi menyatakan bahwa daerah yang tertinggal secara ekonomi pada akhirnya akan mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang lebih maju melalui difusi teknologi dan mobilitas faktor produksi. Namun, penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa konvergensi tidak otomatis terjadi, terutama karena hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan daerah yang lemah (World Bank, 2023).

Studi Yusuf dan Sumner (2015) menggarisbawahi bahwa perbedaan struktur ekonomi merupakan faktor utama dalam kesenjangan perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Perkotaan umumnya didominasi oleh sektor jasa dan industri manufaktur yang berorientasi ekspor, sedangkan pedesaan bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan fluktuasi pendapatan tinggi akibat ketergantungan pada harga komoditas. Selain faktor struktural, teori geografi ekonomi baru (Krugman, 1991) menjelaskan bahwa aglomerasi kegiatan ekonomi di perkotaan menciptakan keuntungan skala (economies of scale) dan menurunkan biaya transaksi. Namun, proses aglomerasi ini juga dapat meningkatkan kesenjangan karena menarik tenaga kerja terampil dan modal dari pedesaan, sehingga mengurangi potensi pertumbuhan wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryahadi et al. (2022) menekankan pentingnya peran kebijakan fiskal dan transfer antarwilayah dalam mengurangi ketimpangan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola di tingkat daerah.

Transfer fiskal yang besar tidak akan berdampak optimal jika tidak disertai dengan perencanaan pembangunan yang baik dan transparansi penggunaan anggaran. Literatur internasional, seperti yang disampaikan oleh OECD (2023), juga menunjukkan bahwa kesenjangan digital merupakan dimensi baru dalam kesenjangan wilayah. Perbedaan akses internet dan keterampilan digital membatasi partisipasi masyarakat pedesaan dalam ekonomi digital global. Hal ini memperkuat kesenjangan bukan hanya dalam pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap informasi, pendidikan daring, dan peluang usaha berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi perkotaan-pedesaan di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, geografis, institusional, dan teknologi. Oleh karena itu, upaya pengurangannya memerlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola, serta penguatan koneksi digital di wilayah pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder dari BPS, Kementerian Keuangan, dan World Bank. Indikator yang dianalisis meliputi: 1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. 2). Tingkat kemiskinan. 3). Indeks Gini. 4). Akses infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih). Dan 5). Akses internet dan layanan digital. Data dianalisis menggunakan perbandingan rata-rata antarwilayah dan tren perkembangan dari tahun 2015–2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Pendapatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2025, PDRB per kapita di wilayah perkotaan di Indonesia rata-rata mencapai 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam distribusi sumber daya ekonomi dan akses terhadap peluang pembangunan. Wilayah perkotaan cenderung memiliki infrastruktur yang memadai, akses transportasi yang baik, serta pasar tenaga kerja yang lebih dinamis, sehingga mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (BPS, 2025).

Diversifikasi ekonomi menjadi faktor kunci yang membedakan perkembangan wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, sektor ekonomi terdistribusi secara relatif merata antara industri manufaktur, jasa keuangan, perdagangan, serta teknologi informasi. Hal ini menciptakan ketahanan ekonomi terhadap guncangan sektoral. Sebaliknya, wilayah pedesaan masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas global, serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern (Susanti & Hartono, 2023).

Perbedaan produktivitas tenaga kerja juga berkontribusi pada disparitas pendapatan ini. Tenaga kerja di perkotaan umumnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk mengakses pekerjaan dengan upah lebih besar. Di sisi lain, keterbatasan akses pendidikan berkualitas di pedesaan menghambat mobilitas sosial ekonomi dan memperkuat lingkaran ketimpangan antarwilayah (World Bank, 2023).

Disparitas ini juga diperburuk oleh kesenjangan investasi, baik investasi swasta maupun publik. Wilayah perkotaan lebih menarik bagi investor karena menawarkan pasar yang lebih besar, infrastruktur yang memadai, dan ekosistem bisnis yang berkembang. Sementara itu, pedesaan sering kali tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet, sehingga mengurangi daya tariknya sebagai lokasi investasi (OECD, 2023). Urbanisasi berperan ganda dalam dinamika disparitas pendapatan. Di satu sisi, urbanisasi dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi individu yang berpindah ke kota, tetapi di sisi lain, migrasi berlebihan tanpa perencanaan dapat menciptakan masalah baru seperti

kemiskinan perkotaan, ketimpangan intrakota, dan tekanan terhadap layanan publik. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kesenjangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan akan sulit diatasi dan bahkan berpotensi meningkat di masa depan (Firdaus & Ananda, 2022).

Oleh karena itu, pengurangan disparitas pendapatan memerlukan strategi pembangunan yang mengintegrasikan penguatan ekonomi lokal di pedesaan, perluasan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta insentif investasi di daerah non-perkotaan. Pemerataan akses digital dan teknologi juga menjadi kunci dalam menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat menjembatani kesenjangan antara kedua wilayah tersebut (Bappenas, 2024).

Akses Infrastruktur Dan Layanan Publik

Wilayah perkotaan di Indonesia secara umum memiliki rasio jalan mantap yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Data BPS (2025) menunjukkan bahwa hampir seluruh jalan di pusat kota berada dalam kondisi baik, sedangkan di pedesaan, terutama di daerah terpencil, masih terdapat jalan tanah atau jalan berbatu yang sulit dilalui pada musim hujan. Perbedaan kualitas infrastruktur transportasi ini memengaruhi efisiensi distribusi barang, biaya logistik, dan akses masyarakat terhadap pasar.

Tingkat elektrifikasi di wilayah perkotaan juga hampir mencapai 100%, dengan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau. Kondisi ini mendukung produktivitas sektor industri dan jasa, serta memungkinkan pemanfaatan teknologi digital secara maksimal. Sebaliknya, di sebagian wilayah pedesaan, terutama di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, rasio elektrifikasi masih di bawah target nasional. Keterbatasan pasokan listrik menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi daya tarik investasi (Kementerian ESDM, 2024).

Akses terhadap air bersih juga menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Di kota-kota besar, layanan air bersih umumnya dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) dengan jangkauan luas dan kualitas terjamin. Di pedesaan, banyak masyarakat masih mengandalkan sumber air tradisional seperti sumur gali, sungai, atau mata air, yang kualitasnya sering tidak memenuhi standar kesehatan. Keterbatasan ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja (WHO, 2023). Layanan kesehatan merupakan sektor lain yang menunjukkan perbedaan mencolok antara perkotaan dan pedesaan. Rumah sakit besar dengan fasilitas modern, tenaga medis spesialis, dan peralatan canggih umumnya hanya tersedia di kota-kota besar. Sementara itu, fasilitas kesehatan di pedesaan sering kali hanya berupa puskesmas atau klinik dengan sumber daya terbatas. Akibatnya, masyarakat pedesaan kerap harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai (Kementerian Kesehatan, 2024).

Di bidang pendidikan, perkotaan memiliki lebih banyak sekolah dengan fasilitas lengkap, guru berkualifikasi, dan akses ke pendidikan tinggi. Sebaliknya, sekolah di pedesaan masih menghadapi kekurangan guru, minimnya sarana belajar, dan keterbatasan akses internet. Hal ini memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara kedua wilayah tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada disparitas pendapatan jangka panjang (UNESCO, 2023).

Akses terhadap layanan publik berbasis digital juga masih timpang. Transformasi digital yang pesat di perkotaan, seperti layanan administrasi online, pembayaran digital, dan e-commerce, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Minimnya infrastruktur telekomunikasi dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Padahal, pemerataan akses digital dapat menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antarwilayah (World Bank, 2023).

Oleh karena itu, strategi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Indonesia harus menekankan pemerataan antarwilayah. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jalan mantap di pedesaan, meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas jaringan air bersih, memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta memperluas akses internet berkualitas. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Bappenas, 2024).

Konektivitas Digital

Sejak 2020, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia mengalami kemajuan pesat, termasuk perluasan jaringan 4G dan pengenalan teknologi 5G di beberapa kota besar. Akses internet di pedesaan pun meningkat signifikan berkat program pemerintah seperti Bakti Kominfo dan proyek Palapa Ring. Namun, meskipun cakupan jaringan semakin luas, kualitas layanan di pedesaan masih tertinggal jauh dibandingkan perkotaan. Kecepatan unduh rata-rata di kota besar bisa mencapai lebih dari 40 Mbps, sementara di pedesaan banyak yang masih berada di kisaran 5–10 Mbps (Ookla, 2024).

Kesenjangan kualitas jaringan ini berimplikasi langsung pada terbatasnya peluang ekonomi berbasis teknologi di pedesaan. Usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan pasar melalui e-commerce, pemasaran digital, atau layanan daring seringkali terkendala oleh koneksi internet yang lambat dan tidak stabil. Hal ini membatasi daya saing pelaku usaha pedesaan dibandingkan pelaku usaha perkotaan yang memiliki akses infrastruktur digital yang lebih baik (World Bank, 2023).

Selain kualitas jaringan, biaya akses internet di pedesaan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat setempat. Ketidakseimbangan ini membuat adopsi teknologi digital tidak merata, meskipun perangkat seperti smartphone semakin terjangkau. Rendahnya literasi digital juga menjadi hambatan tambahan, di mana sebagian masyarakat pedesaan belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan internet untuk kegiatan produktif (Kominfo, 2024). Akses digital yang terbatas berdampak pada sektor pendidikan di pedesaan. Selama pandemi COVID-19, misalnya, banyak siswa di wilayah terpencil kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan koneksi. Meskipun situasi darurat pandemi telah berlalu, tantangan tersebut menunjukkan bahwa konektivitas digital merupakan prasyarat penting bagi pemerataan kualitas pendidikan di era digital (UNESCO, 2023).

Dari sisi pemerintahan, keterbatasan konektivitas di pedesaan menghambat penerapan layanan publik berbasis digital (e-government). Padahal, digitalisasi layanan publik dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya birokrasi. Oleh karena itu, kesenjangan digital tidak hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga isu tata kelola dan pelayanan publik (Bappenas, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan terpadu yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, subsidi biaya internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), peningkatan literasi digital, serta dukungan bagi pelaku usaha pedesaan untuk mengakses pasar daring. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan digital, tetapi juga memperluas peluang ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di era ekonomi berbasis pengetahuan (OECD, 2023).

Pendidikan Dan Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk pedesaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Data BPS (2025) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di perkotaan mencapai 10,5 tahun, sedangkan di pedesaan hanya sekitar 7,8 tahun. Perbedaan ini berdampak langsung pada kemampuan bersaing tenaga kerja di pasar, karena tingkat pendidikan berhubungan erat dengan keterampilan dan produktivitas individu (Todaro & Smith, 2020).

Kesenjangan pendidikan ini juga dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas. Sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sebagian besar berlokasi di pusat kota, sehingga siswa di pedesaan menghadapi tantangan jarak, biaya transportasi, dan keterbatasan fasilitas belajar. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah di pedesaan cenderung lebih tinggi, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah (Kemendikbudristek, 2024). Keterbatasan pendidikan berdampak pada kualitas tenaga kerja yang tersedia di pedesaan. Sebagian besar pekerja di wilayah ini masih terlibat dalam sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah. Minimnya pelatihan dan akses ke teknologi modern membuat mereka sulit

beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin mengutamakan keterampilan digital, manajerial, dan inovasi (ILO, 2023).

Fenomena migrasi tenaga kerja muda dari pedesaan ke perkotaan semakin memperlebar kesenjangan sumber daya manusia. Tenaga kerja yang bermigrasi umumnya memiliki keterampilan lebih tinggi, meninggalkan kelompok pekerja yang relatif kurang terampil di desa. Kondisi ini tidak hanya memperlambat perkembangan ekonomi pedesaan, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial di kota seperti persaingan kerja yang ketat dan pertumbuhan kawasan kumuh (World Bank, 2023).

Pemerintah telah menginisiasi sejumlah program untuk mengurangi kesenjangan ini, seperti pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, pelatihan kerja bagi lulusan sekolah menengah, dan beasiswa bagi mahasiswa dari daerah tertinggal. Namun, efektivitas program tersebut masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkelanjutan (Bappenas, 2024).

Upaya mengatasi kesenjangan pendidikan dan tenaga kerja antara perkotaan dan pedesaan perlu dilakukan secara terintegrasi. Selain memperluas akses pendidikan formal dan nonformal, diperlukan dukungan bagi pengembangan keterampilan yang relevan dengan ekonomi digital dan industri kreatif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja pedesaan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan antarwilayah (OECD, 2023).

KESIMPULAN

Kesenjangan ekonomi kota-desa di Indonesia tahun 2025 disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, akses infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan koneksi digital. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang mencakup: 1). Peningkatan infrastruktur dasar dan digital di pedesaan. 2). Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM dan agroindustri. 3). Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan 3). Reformasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah tertinggal. Kombinasi kebijakan berbasis wilayah (place-based) dan manusia (people-centered) diyakini mampu memperkecil kesenjangan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. N. (2023). Analisis Penyebab Serta Dampak Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Beserta Solusi Untuk Mengatasinya. *Proceedings Series of Educational Studies*, 231-234.
- Arafat, Y., Rafillah, R. A., Tahir, D. A., Dari, D. W., Natasya, A. B., & Ulum, I. M. (2025). Analisis Kesenjangan Pembangunan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Studi Kasus Kota Serang dan Desa Cikedung, Kabupaten Serang. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 189-210.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Indikator Pendidikan Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Basri, Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebijakan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Calista, C. P., Putra, F. A. I., Maulita, F., Zahra, M., & Syakirah, N. A. (2025). KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3965-3978.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- EFENDI, L. O. (2025). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Ketimpangan Antarwilayah. *Circle Archive*, 1(7).

- Firdaus, M., & Ananda, C. F. (2022). Urbanization and inequality in Indonesia: Trends and policy options. *Journal of Regional Development Studies*, 6(2), 115–129.
- Firdausy, C. (1994). *Analisis sosial-ekonomi pertumbuhan dan perkembangan kota terhadap kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat*. Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Dewan Riset Nasional, Proyek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Rural Employment and Skills Development in Indonesia*. Geneva: International Labour Organization.
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan (Analysis of Economic Disparity Condition: Case Study From Regency/City of South Sulawesi Indonesia). *Jurnal Info Artha*, 2(1), 37-52.
- Kemendikbudristek. (2024). *Laporan Tahunan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kementerian ESDM. (2024). *Laporan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kementerian Kesehatan. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kominfo. (2024). *Laporan Capaian Program Bakti Kominfo*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Teori Pembangunan Ekonomi*. Balai Pustaka, Jakarta
- Kuncoro. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPM.
- Kuncoro. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program industrialisasi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288-297.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
- OECD. (2023). *Regional Development and Inequality in Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Premana, L., & Marwasta, D. (2018). Ketimpangan Ekonomi di Zona Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(1).
- Priyarsono, D. S., Wijaya, M. B., & Sigiro, E. E. Determinan kesenjangan kemiskinan desa-kota di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(2), 186-195.
- Sasana, H. (2009). Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah dalam era desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(01).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administasi*. Alfabeta, Bandung
- Sukirno, S. 2000. *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumirat, F. (2019). Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah. *Bappenas Working Papers*, 2(2), 270-293.
- Suryahadi, A., et al. (2022). *Regional inequality and its policy challenges in Indonesia*. SMERU Research Institute.
- Susanti, R., & Hartono, D. (2023). Agricultural dependence and income inequality in rural Indonesia. *Asian Journal of Economic Modelling*, 11(1), 34–49.
- Syafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media

-
- Syahrial. 2014. *Analisis Klasifikasi Daerah dan Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Propinsi di Pulau Sumatera*. Universitas Bengkulu, Bengkulu
- Todaro, M. P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Keempat Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. New York: Pearson.
- Tulus T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia. Teori dan Temuan Empiris*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- UNESCO. (2023). *Education for All Global Monitoring Report: Indonesia Case Study*. Paris: UNESCO.
- WHO. (2023). *Drinking Water and Sanitation Progress Report: Indonesia*. Geneva: World Health Organization.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Connectivity for Growth*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2025). *Indonesia Economic Prospects 2025*. Washington DC: World Bank.
- Yasmin, R., & Syofyan, S. (2024). DETERMINASI KETIMPANGAN PENDAPATAN WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIATAHUN 2019–2023. *Media Ekonomi*, 32(1), 45-60.
- Yenny, N., Putra, M., Anggraini, A., & Tanjung, A. S. R. R. (2025). Analisis Perbandingan Sosial Ekonomi Desa dan Kota dalam Pembangunan Wilayah. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 103-115.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, poverty and inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323-348.